

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU



RENCANA KERJA TAHUN 2026

DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU

Jalan Basuki Rahmat No. 04 Kota Bengkulu

Telp. (0736) 25253

Website : <https://dinsos.bengkuluprov.go.id>

email : dinsosprovbengkulu@gmail.com



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Renja Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2026 ini dapat tersusun.

Sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2026 Dinas Sosial, Rencana Kerja Renja tahun 2026 perlu disusun dalam dokumen karena berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintahan Daerah yang mengatur perubahan urusan pemerintahan dan munculnya fungsi penunjang dan fungsi lainnya, dan juga didasarkan pada kebijakan dari pemerintah pusat dan adanya kebutuhan pembangunan kesejahteraan sosial yang menjadi tugas dari Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.

Renja ini merupakan rencana kerja yang menjadi kerangka acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2026. Dengan disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum kegiatan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial sebagai tahapan kegiatan dalam kerangka mewujudkan Visi Dinas Sosial yaitu "Terwujudnya Pelayanan Sosial Yang Profesional".

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Bengkulu ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Bengkulu, November 2025

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU

SWIFANEDI YUSDA, S.Hut.

Pembina Tk. II (IV/b)

NIP. 197608152008041001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Dasar Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	14
2.3. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	15
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	16
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja.....	17
3.3. Program dan Kegiatan.....	18
BAB IV PENUTUP.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Proses pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, harus dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) . Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja OPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dengan Mempedomani rancangan akhir RKPD tahun 2026. Renja berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD adalah :

1. Berpedoman pada Renstra SKPD 2021 - 2029 dan mengacu pada Rancangan RKPD 2026;
2. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan pengeluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n-1.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Dalam penyusunan Rencana Kerja



Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2026 dilakukan penyamaan persepsi teknis pada masing-masing Bidang dan UPTD sehingga tercapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Tahapan Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya dan mengacu pada Rancangan Awal RKPD tahun berkenaan.
2. Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu berikut permasalahan dan kendala yang dihadapi.
3. Program, kegiatan dan Sub kegiatan dalam Rancangan Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

Dengan menimbang keterbatasan anggaran sehingga kegiatan awal penyusunan akan dilakukan rapat koordinasi dengan masing-masing bidang teknis Dinas Sosial dengan memperhatikan kebutuhan dan usulan masing-masing program.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

- a. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- c. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4967);
- e. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);



-
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 - o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
 - p. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.



-
- q. Peraturan Daerah No.15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
 - r. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021 - 2026.
 - s. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
 - t. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu.(Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 32);
 - u. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 21);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2026 antara lain :

1. Memberikan informasi tentang rencana program dan kegiatan tahunan
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program
3. Sebagai bahan masukan/landasan dalam penyusunan kegiatan tahun 2026
4. Mendukung upaya mewujudkan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD dalam waktu 1 tahun anggaran

Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial Provinsi Bengkulu adalah :

1. Untuk menyiapkan rancangan dari program, kegiatan, sub kegiatan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu.
2. Menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan terutama dalam menjalankan kewenangannya dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah untuk mendiskripsikan tentang program prioritas pembangunan nasional dan daerah yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial Provinsi Bengkulu



1.4. Sistematika Penulisan

Secara sistematika Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III TUJUAN, SASARAN OPD

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2026, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

- a. Masalah - masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran - sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan - kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Awal Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun 2026 juga memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2026;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah - masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2024 dapat dilihat dari tabel pengukuran pencapaian sasaran tahun 2024 sebagai berikut :



Tabel 2
PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

OPD : Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
Tahun Anggaran : 2024

NO	Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Sub Output)	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Rencana	Realisasi	Capaian Keuangan %
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PERSENTASE TERLAKSANANNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
A1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %	71.810.000	71.551.135	99,64
A2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pesentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117 Orang	117 Orang	100 %	13.627.933.903	13.245.685.271	97,20
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	71.669.000	71.489.000	99.75
A3	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Adm.umum yang dilaksanakan						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100 %	15.000.000	14.997.000	99,98
	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	2 paket	100 %	35.000.000	34.990.700	99,97
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	100 %	90.000.000	89.994.200	99,99
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100 %	20.000.000	19.934.000	99,67



	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 lap	1 lap	100 %	15.000.000	14.989.500	99,93
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD rakan	1 lap	1 lap	100 %	325.000.000	324.992.943	100,00
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD		1 Dok	1 Dok	100 %	15.000.000	14.900.000	99,33
A4	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 unit	37 unit	100 %	265.000.000	259.998.000	98,11%
A5	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 lap	1 lap	100 %	10.000.000	8.858.500	88,59
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 lap	1 lap	100 %	261.000.000	256.065.048	98,11
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 lap	1 lap	100 %	735.000.000	730.665.400	99,41
A6	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	36 unit	36 unit	100 %	212.250.000	188.118.755	88,63
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	14 unit	14 unit	100 %	10.000.000	9.994.617	99,54
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100 %	140.000.000	139.996.460	100,00
B	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL						
B1	Kegiatan : Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Presentase PSKS yang diberdayakan dalam						



		penyelenggaraan kesejahteraan sosial						
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi Yang Meningkatkan Kapasitasnya	128 Orang	128 Orang	100 %	159.800.000	153.640.000	96,15
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan provinsi yang meningkat kemampuan dan potensinya	50 Orang	890 Orang	100 %	334.000.000	328.546.000	98,37
C	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PERSENTASE TERLAKSANANYA PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						
C1	Kegiatan : Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	10,000,000	9.994.000	99.23
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 TMP	1 TMP	100 %	10,000,000	9.923.000	100,00
D	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PERSENTASE KELOMPOK RENTAN YANG MENDAPATKAN PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DALAM PANTI						
D1	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	100 %	100 %	100 %	290.390.800	284.148.800	97,85
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	137 %	137 %	100 %	290.390.800	284.148.800	97,85
D2	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Persentase anak terlantar yang di rehabilitasi di dalam panti						
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	20 orang	19 orang	86 %	282.680.000	277.320.000	98,10
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan	20 orang	19 orang	100 %	50.000.000	49.662.000	99,32



		Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi						
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	20 orang	19 orang	100 %	5.000.000	5.000.000	100.00
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	20 orang	19 orang	100 %	10,000,000	9.995.000	99,95
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	20 orang	19 orang	100 %	10,000,000	10.000.000	100.00
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	20 orang	19 orang	100 %	34.500.000	34.483.000	99,95
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	20 orang	19 orang	100 %	5,000,000	4.992.000	99,84
D3	Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang direhabilitasi di dalam panti						
	Penyediaan permakanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Privinsi	70 orang	80 orang	100 %	1.030.760.000	1.014.160.000	98,39%
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	70 orang	70 orang	100 %	43.200.000	43.200.000	98.48
	Penyediaan asrama	Jumlah Orang Yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	70 orang	70 orang	100 %	5.000.000	5.000.000	100.00
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	70 orang	790 orang	71,42 %	25,000,000	25,000,000	100.00
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	70 orang	70 orang	100 %	15.000.000	15.000.000	100.00
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas							



	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 orang	10 orang	100 %	5,000,000	5.000.000	100.00
	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	14 orang	6 orang	42,86 %	20.000.000	11.610.000	58,05
E	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PERSENTASE KPM YANG MEMPEROLEH BANTUAN SOSIAL						
E1	Kegiatan : Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal yang dilaksanakan						
	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provins	27 Orang	26 Orang	96,30%	60,000,000	55.970.726	98.39
E2	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Persentase KPM yang Memperoleh Bantuan Sosial						
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	4.000 Keluarga	2.180 Keluarga	54,50%	5.038.558.800	4.648.364.165	92,26
F	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PESENTASE KEJADIAN BENCANAN ALAM DAN SOSIAL YANG TERTANGGULANGI						
F1	Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani						
	Penanganan khusus kelompok rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi	28 orang	23 orang	100,00 %	100,000,000	99.983.000	99,98



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Sosial Provinsi Bengkulu sebagai lembaga pelaksana urusan wajib pemerintahan bidang sosial dan Program Prioritas Pembangunan Dalam Urusan Wajib Bidang Sosial menyelenggarakan fungsi Bidang Rehabilitasi Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Penanggulangan Bencana. Sejalan dengan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial, Dinas Sosial sebagai lembaga teknis pelaksana menyediakan pelayanan sebagai berikut:

1. Peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial Provinsi
2. Rehabilitasi Sosial Dasar bagi penyandang disabilitas Terlantar di dalam Panti
3. Rehabilitasi Sosial Dasar anak Terlantar di dalam Panti
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
5. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
6. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
7. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
8. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
9. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Dalam penerapan layanan tersebut telah dilakukan pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disesuaikan dan dianalisis berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator-indikator yang dapat dipenuhi untuk mendukung dan melaksanakan pelayanan masyarakat pada Dinas Sosial, yaitu :

1. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan peningkatan kompetensi kesejahteraan sosial
2. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) didalam panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial
3. Jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial melalui program Kartu Bengkulu Sejahtera (KBS)
4. Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut :

No	Indikator kinerja	Realisasi			Tahun 2024	
		2021	2022	2023	Target	Kinerja
1	Persentase PMKS yang tertangani	79,9 %	79,3 %	76 %	76,5 %	81,6 %
2	Presentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	56 %	52,7 %	56 %	57 %	59,97 %

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Kondisi atau gambaran umum pelayanan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu yang telah diuraikan sebelumnya, dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan Provinsi Bengkulu. Sehingga isu-isu pembangunan yang faktual tersebut akan menentukan agenda kebijakan, sasaran serta program dan kegiatan pembangunan yang akan digulirkan.

Berdasarkan hal-hal diatas, beberapa isu strategis Dinas Sosial Provinsi Bengkulu antara lain :

- 1) Belum optimalnya pendayagunaan sarana prasarana dan kapasitas kelembagaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dalam bidang sosial.
- 2) Keterbatasan SDM baik tenaga fungsional maupun staf masih dirasakan kurang sesuai dengan kebutuhan yang ada.
- 3) Belum optimalnya Dinas Sosial Kabupaten Kota dalam pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial
- 4) Belum maksimalnya Kualitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- 5) Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) belum optimal dan Manajemen/ Pengelola yang belum profesional
- 6) Belum terbentuknya panti bagi penyandang disabilitas dan tuna sosial, sehingga belum optimalnya dalam pemenuhan pelayanan PMKS
- 7) Belum optimalnya dukungan anggaran baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk bidang sosial.

Meskipun tidak secara langsung berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, namun jika tidak segera diatasi permasalahan tersebut akan sangat menghambat kinerja dan pencapaian Visi dan Misi, karena pada hakikatnya proses pencapaian target-target pembangunan diawali dengan perencanaan yang baik.



BAB III**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 18 mengamanatkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) pasal 10 : Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial Daerah Provinsi terdiri atas :

- a) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
- b) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
- c) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
- d) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- e) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Selanjutnya Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupate/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial. Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;

3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dan difokuskan pada capaian sasaran pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan melalui evaluasi permasalahan pembangunan daerah yang dihubungkan dengan program pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun rencana. Prioritas tersebut mendukung Visi dan Misi gubernur terpilih yaitu :

Visi : Bengkulu Maju Yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan

Misi 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Akuntabel Dengan Membangun Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Berbudaya, Profesional Serta Religius.

Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan

Sasaran : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang inovatif berbasis IPTEK

Misi 3 : Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan Rasa Aman.

Tujuan : Meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial dan demokratis

Sasaran : Menurunnya kemiskinan

Tabel 3.1
Draf Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026

Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD
Terwujudnya kesejahteraan sosial yang inklusif didukung oleh tata kelola kinerja perangkat daerah yang efisien dan efektif	Indeks kesejahteraan sosial	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial yang adaptif dan tepat sasaran	Persentase KPM yang mendapatkan manfaat pelayanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial yang adaptif dan tepat sasaran
			Persentase PSKS yang diberdayakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SaKIP Dinas Sosial

3.3. Program Dan Kegiatan

Rancangan Renja Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2026

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1	2	3
	Dinas Sosial Provinsi Bengkulu	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah



1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan



	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-



2.1	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
2.2	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	-
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi
	Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya
	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial
	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
	Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar
	Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi
	Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Jumlah Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Kabupaten/Kota yang Memberikan Layanan Sosial Satu Pintu dan Berperan sebagai Hub Program Graduasi
	Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-
3.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	-
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi



	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
3.2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	-
	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi
3.3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi



	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi
	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi
	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi
	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi
3.4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	-
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi
	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi
3.5	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	-
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi
	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA



4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-
4.1	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	-
	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi
4.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	-
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin
	Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial	Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi
	Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai
	Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-
5.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	-
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi
	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi
	Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai
	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana
	Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)



	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas
	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-
6.1	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
	Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk program, kegiatan dan sub Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu tahun 2026 dapat diuraikan pada tabel 3.4. berikut :



Tabel 3.4
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu
Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Catatan	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027
			Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)		Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	Dinas Sosial Provinsi Bengkulu			15.643.506.805,00		36.215.482.600,00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			15.643.506.805,00		36.215.482.600,00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			15.643.506.805,00		36.215.482.600,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			24.040.882.600,00
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			540.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	28.547.500,00		200.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0		100.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0		165.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	8.095.000,00		40.000.000,00



	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	10 Data	7.192.000,00		35.000.000,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			15.675.882.600,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	133 Orang/ Bulan	10.631.831.255,00		15.413.002.600,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	0		97.880.000,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	82.230.000,00		35.000.000,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0		5.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0		20.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0		55.000.000,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	3.155.000,00		50.000.000,00
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			150.000.000,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0		50.000.000,00
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0		50.000.000,00



	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0		25.000.000,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.975.000,00		25.000.000,00
1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	0		60.000.000,00
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Dokumen	0		30.000.000,00
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	0 Dokumen	0		30.000.000,00
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0		450.000.000,00
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0		65.000.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0		120.000.000,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0		55.000.000,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0		55.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0		75.000.000,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0		50.000.000,00



	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0		30.000.000,00
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			865.000.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	32.500.000,00		55.000.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	8.470.000,00		65.000.000,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	24.750.000,00		65.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	47.500.000,00		80.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12.500.000,00		55.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.000.000,00		25.000.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	34.125.000,00		55.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	78.083.250,00		365.000.000,00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0		50.000.000,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3.360.000,00		50.000.000,00



1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			3.850.000.000,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0		450.000.000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0		1.000.000.000,00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0		300.000.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	24.632.500,00		100.000.000,00
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0		2.000.000.000,00
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			1.220.000.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.165.000,00		20.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	328.496.700,00		400.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	455.900.000,00		800.000.000,00
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			1.230.000.000,00



	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	247.499.550,00		300.000.000,00
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0		10.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	35.000.000,00		20.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.945.000,00		650.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0		250.000.000,00
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-			1.410.000.000,00
2.1	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	0		20.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	0	0		20.000.000,00
2.2	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	-	-	0,00		1.390.000.000,00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	50 Keluarga	843.422.500,00		200.000.000,00



Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	40 Lembaga	20.085.000,00		200.000.000,00
Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan	0 Lembaga	0		100.000.000,00
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang	17.357.000,00		160.000.000,00
Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	0 Orang	0		30.000.000,00
Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	0 Orang	0		100.000.000,00
Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar	0 Bulan Layanan	0		150.000.000,00
Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi	0 Orang	0		50.000.000,00



	Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Jumlah Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	0 Badan Usaha	0		100.000.000,00
	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas Kabupaten/Kota yang Memberikan Layanan Sosial Satu Pintu dan Berperan sebagai Hub Program Graduasi	0 Lembaga	0		200.000.000,00
	Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional	0 Orang	0		100.000.000,00
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	-			5.308.600.000,00
3.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	-	-	0,00		210.000.000,00
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	35 Orang	23.740.000,00		40.000.000,00
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	35 Orang	9.362.500,00		50.000.000,00
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	0 Orang	0,00		50.000.000,00
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	12 Orang	9.945.000,00		20.000.000,00
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	35 Orang	4.612.500,00		10.000.000,00



	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 Orang	5.000.000,00		7.000.000,00
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	0 Orang	0		8.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Dokumen	14.918.000,00		25.000.000,00
3.2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	-	-			1.735.600.000,00
	Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	0 Orang	0		11.000.000,00
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	23 Orang	44.875.000,00		72.000.000,00
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	23 Orang	7.097.500,00		1.000.000.000,00
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	23 Orang	34.712.500,00		35.000.000,00
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	23 Orang	20.850.000,00		16.000.000,00
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	0 Orang	0		25.000.000,00



	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	23 Orang	14.988.300,00		45.000.000,00
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Orang	3.073.250,00		21.000.000,00
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	23 Orang	0		7.500.000,00
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	23 Orang	299.680.500,00		450.000.000,00
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen	3.996.250,00		50.000.000,00
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	0 Orang	0		3.100.000,00
3.3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	-	-	0		3.210.000.000,00
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	70 Orang	1.036.712.500,00		1.500.000.000,00
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	70 Orang	44.382.500,00		65.000.000,00
	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	70 Orang	5.000.000,00		1.000.000.000,00



Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	10 Orang	10.000.000,00		30.000.000,00
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	70 Orang	54.415.000,00		40.000.000,00
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	70 Orang	14.974.000,00		40.000.000,00
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	0 Orang	0		60.000.000,00
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	4.986.000,00		30.000.000,00
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	0 Orang	0		40.000.000,00
Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	12 Orang	23.367.500,00		35.000.000,00
Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	0 Orang	0		15.000.000,00
Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	70 Orang	3.650.000		55.000.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	0		100.000.000,00



	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	0 Orang	0		200.000.000,00
3.4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant	-	-			90.000.000,00
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	0 Orang	0		30.000.000,00
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan Provinsi	0 Orang	0		20.000.000,00
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	0 Orang	0		20.000.000,00
	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	20 Orang	5.162.000,00		20.000.000,00
3.5	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant	-	-	0		63.000.000,00
	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	0 Orang	0		40.000.000,00
	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	0 Orang	0		13.000.000,00



	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	0 Dokumen	0		10.000.000,00
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-			3.636.000.000,00
4.1	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	-	-			80.000.000,00
	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	15 Orang	24.255.500,00		80.000.000,00
4.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	-	-			3.556.000.000,00
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	0 Orang	0		250.000.000,00
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	150 Orang	296.424.250,00		2.240.000.000,00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	10 Kab/Kota	4.949.750,00		110.000.000,00
	Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial	Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi	0 Orang	0		83.000.000,00



	Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	1 Dokumen	5.190.000,00		73.000.000,00
	Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota	0 Orang	0		800.000.000,00
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	-	-			1.470.000.000,00
5.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	-	-			1.470.000.000,00
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	51 Orang	19.710.000,00		155.000.000,00
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	51 Orang	17.720.250,00		110.000.000,00
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	51 Orang	14.100.000,00		115.000.000,00
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	51 Orang	16.544.000,00		110.000.000,00
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	51 Orang	35.885.000,00		110.000.000,00
	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	0 Orang	0		100.000.000,00
	Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	10 Keluarga	10.000.000,00		100.000.000,00



	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	0 Orang	0		55.000.000,00
	Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	0 Dokumen	0		30.000.000,00
	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	0 Orang	0		85.000.000,00
	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	5 Desa/Kel.	523.900.000,00		500.000.000,00
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-			350.000.000,00
6.1	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	-	-			350.000.000,00
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	0 Dokumen	0		200.000.000,00
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	43.510.000,00		60.000.000,00
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	0 Laporan	0		20.000.000,00
	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	0 Orang	0		20.000.000,00



	Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	0 Orang	0		50.000.000,00
				15.778.506.805,00		36.215.482.600,00



Program tersebut telah diselaraskan dengan Visi dan Misi Pelayanan Publik Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, yaitu :

Visi : Terwujudnya Pelayanan Sosial Yang Profesional

MISI Dinas Sosial, yaitu :

1. Menyediakan data dan informasi pelayanan sosial yang akurat,terpercaya dan up to date
2. Menyelenggarakan pelayanan sosial yang prima (service excellent)
3. Menyelenggarakan perizinan sosial yang cepat, tepat dan transparan



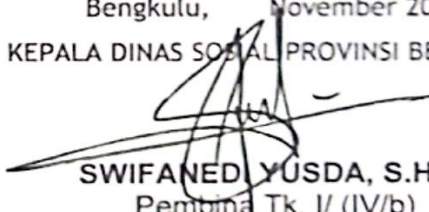
BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Bengkulu merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Strategis dimana telah dilakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri nomor 90 Tahun 2019. Penjabaran ini diharapkan mampu menjadi pedoman perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2026.

Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD. Penyusunan renja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan pemerintah daerah. Maka dengan adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa renja ini belum sempurna, oleh karena itu saran masukan sangat diharapkan agar dalam penyusunan renja di masa mendatang akan lebih baik.

Bengkulu, November 2025
KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU


SWIFANED YUSDA, S.Hut.
Pembina Tk. II (IV/b)
NIP. 197608152008041001